

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMBERIAN IZIN PERJUDIAN BERDASARKAN PASAL 427 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh

I Made Bagus Putra Veridinata, NIM 2214101152
Program studi Ilmu hukum

ABSTRAK

Perumusan unsur "tanpa izin" dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan persoalan yuridis karena mengandaikan adanya kemungkinan pemberian izin terhadap perjudian, sementara hukum positif Indonesia belum mengatur kewenangan, mekanisme, maupun prosedur pemberian izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisis unsur "tanpa izin" dalam Pasal 426 dan Pasal 427 berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP Baru mengalami pembaruan melalui perbedaan pertanggungjawaban pidana antara penyelenggara perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan pemain perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 427, disertai dengan perbedaan ancaman pidana berdasarkan bentuk perbuatan dan tingkat keterlibatan pelaku. Meskipun demikian, kedua pasal tersebut tetap mempertahankan unsur "tanpa izin" sebagai unsur yang menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perjudian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur dasar hukum mengenai kewenangan, mekanisme, maupun prosedur pemberian izin perjudian. Akibatnya, keberadaan unsur "tanpa izin" menimbulkan kekaburan norma, ketidakpastian hukum, dan potensi multitafsir sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa*. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap rumusan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pembentukan pengaturan yang secara jelas mengatur kewenangan, mekanisme, dan prosedur pemberian izin agar tercipta kepastian hukum dalam penerapan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: unsur tanpa izin, perjudian, Pasal 426, Pasal 427, KUHP Baru, asas legalitas.

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGALITY OF GRANTING
GAMBLING PERMITS UNDER ARTICLE 427 OF LAW NUMBER 1 OF
2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE**

By

**I Made Bagus Putra Veridinata, NIM 2214101152
Law Study Program**

ABSTRACT

*The formulation of the phrase “without a permit” in Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code gives rise to legal issues because it presupposes the possibility of granting permits for gambling activities, whereas Indonesian positive law does not regulate the authority, mechanism, or procedures for issuing such permits. This study aims to analyze the regulation of gambling offenses under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code and to examine the phrase “without a permit” in Articles 426 and 427 from the perspective of Indonesian positive law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that the regulation of gambling offenses in the new Criminal Code introduces reforms by distinguishing criminal liability between gambling organizers, as regulated under Article 426, and gambling participants, as regulated under Article 427, while also differentiating criminal sanctions based on the nature of the prohibited acts and the degree of the offender’s involvement. Nevertheless, both provisions retain the phrase “without a permit” as an element determining the unlawfulness of gambling offenses. The study further finds that Indonesian positive law has not established a legal basis governing the authority, mechanisms, or procedures for granting gambling permits. Consequently, the inclusion of the phrase “without a permit” creates normative ambiguity, legal uncertainty, and the potential for multiple interpretations, thereby failing to fully satisfy the principle of legality, particularly the principle of *lex certa*. Therefore, it is necessary either to review the formulation of Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code or to establish implementing regulations that clearly govern the authority, mechanisms, and procedures for granting permits in order to ensure legal certainty in the application of these provisions.*

Keywords: *without permission element, gambling, Article 426, Article 427, New Criminal Code, principle of legality.*